



TINJAUAN PUSTAKA: PERAN SEKOLAH ISLAM DALAM MEMBENTUK KESADARAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN SISWA

Fitria¹, Irfan Ali², Eka Putriana³, Rifqi Khairul Anam⁴

¹ Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia

² Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia

³ Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia

⁴ Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia

Email : lailatulfitria865@gmail.com¹, irfanali200101@gmail.com², Putrianaeka388@gmail.com³, rifqistaimpro@iad-probolinggo.ac.id⁴

E-Issn: 3063-8313

Received: Desember 2025

Accepted: Desember 2025

Published: Januari 2025

Abstract :

Islamic schools play a strategic role in shaping students' political and civic awareness amid the increasingly complex socio-political dynamics of Indonesian society. This article aims to systematically examine the role of Islamic schools in cultivating students' political awareness and civic identity based on findings from previous studies. The method employed is a literature review, analyzing various scholarly sources, including books, journal articles, and policy documents related to Islamic education, civic education, and political education. The findings indicate that Islamic schools contribute significantly through the integration of the national curriculum with Islamic values, particularly within Civic and Pancasila Education, Islamic Religious Education, as well as extracurricular activities and school culture. Islamic values such as justice (al-'adl), trust (amanah), deliberation (shura), responsibility, tolerance, and social concern serve as ethical foundations in shaping students' moderate and democratic political attitudes. Moreover, teachers' roles as role models, participatory school environments, and students' involvement in school organizations further strengthen the formation of civic awareness. Nevertheless, the review also identifies several challenges, including limited teacher competence, insufficient curriculum integration, and the influence of globalization. Therefore, strengthening political education grounded in Islamic values is essential to developing a generation of Muslims with strong character, political awareness, and responsibility within democratic life.

Keywords : *Islamic schools, political awareness, civic education, Islamic values, citizen participation*

Abstrak :

Sekolah Islam memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran politik dan kewarganegaraan siswa di tengah dinamika sosial-politik masyarakat Indonesia yang semakin kompleks. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis peran sekolah Islam dalam menanamkan kesadaran politik dan identitas kewarganegaraan siswa berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka (literature review) dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan pendidikan Islam, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa sekolah Islam berkontribusi signifikan melalui integrasi kurikulum nasional dan nilai-nilai keislaman, khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama Islam, serta kegiatan ekstrakurikuler dan budaya sekolah. Nilai-nilai Islam seperti keadilan (al-'adl), amanah, musyawarah (syura), tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian sosial menjadi fondasi etis dalam membentuk sikap politik siswa yang moderat dan demokratis. Selain itu, peran guru sebagai teladan, lingkungan sekolah yang partisipatif, serta keterlibatan siswa dalam organisasi sekolah



turut memperkuat pembentukan kesadaran kewarganegaraan. Namun demikian, kajian ini juga menemukan berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi pendidik, kurangnya integrasi kurikulum, dan pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, penguatan pendidikan politik berbasis nilai Islam menjadi kebutuhan penting dalam membentuk generasi muslim yang berkarakter, sadar politik, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis.

Kata Kunci: Sekolah Islam, kesadaran politik, pendidikan kewarganegaraan, nilai keislaman, partisipasi warga negara

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai fungsi penting dalam membentuk peserta didik, baik dari sisi pengetahuan, sikap, maupun perilaku. Pendidikan tidak hanya diarahkan pada penguasaan aspek kognitif, tetapi juga pengembangan dimensi afektif, moral, spiritual, sosial, dan tanggung jawab kewarganegaraan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokratis yang pluralistik, proses pendidikan harus menghasilkan generasi yang mampu berpikir kritis, bersikap matang, dan mampu terlibat dalam kehidupan kenegaraan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan politik dan kewarganegaraan menjadi bagian penting dalam agenda pendidikan nasional. Sekolah Islam sebagai salah satu lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam melahirkan generasi muslim yang beriman sekaligus aktif dalam dinamika sosial politik. Upaya menumbuhkan kesadaran politik dan sikap kewarganegaraan melalui sekolah Islam menjadi semakin urgen di tengah perubahan sosial yang dinamis.

Dalam perspektif ajaran Islam, pendidikan tidak hanya berfokus pada ritual ibadah, tetapi juga menempatkan konsep tanggung jawab sosial seperti khilafah, amar ma'ruf nahi munkar, solidaritas (ukhuwwah), dan keadilan sebagai dasar filosofis dalam berinteraksi di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan di sekolah Islam dituntut untuk tidak sekadar menyampaikan materi agama secara formal, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial, kesetaraan, keadilan, serta kepedulian terhadap kondisi masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia beriman dan bertakwa serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Karena itu, keberadaan sekolah Islam memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran politik dan kewarganegaraan siswa sebagai bagian integral dari tujuan pendidikan nasional (Anjani & Fadhil, 2025).

Dalam perkembangan mutakhir, pendidikan Islam mengalami transformasi paradigma, dimana sekolah Islam tidak lagi dipahami semata sebagai tempat pembelajaran nilai-nilai moral dan ritual, melainkan sebagai ruang penting dalam membangun karakter sosial dan politik masyarakat (Hidayat, Agama, Sangatta, & Timur, 2023). Transformasi ini dapat dilihat dari pengintegrasian pendidikan kewarganegaraan, pelatihan kepemimpinan, aktivitas organisasi siswa, kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga program pembelajaran berbasis proyek sosial. Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya hadir sebagai mata pelajaran formal, tetapi

sebagai sarana pembinaan nilai dan sikap yang mendorong pembentukan identitas diri, kepedulian sosial, kemampuan berpikir kritis, dan kesadaran politik yang konstruktif. Dengan demikian, sekolah Islam menjalankan fungsi sebagai penghubung antara nilai-nilai Islam, konteks kebangsaan, serta dinamika kehidupan modern.

Di sisi lain, realitas sosial-politik Indonesia saat ini memperlihatkan sejumlah persoalan terkait generasi muda, seperti rendahnya kesadaran politik, sikap apatis terhadap isu kenegaraan, meningkatnya intoleransi, polarisasi identitas, serta tingginya kerentanan terhadap penyebaran hoaks di ranah digital. Fenomena ini menjadi tantangan bagi proses demokratisasi, sehingga diperlukan pendidikan politik yang sistematis dan berbasis nilai-nilai etik. Peserta didik perlu memahami konsep-konsep dasar politik sekaligus menginternalisasikan nilai demokrasi, toleransi, pluralisme, keadilan, serta kemampuan mengkritisi fenomena publik. Sekolah Islam memiliki peluang besar untuk melakukan hal ini, karena pendidikan Islam memiliki fondasi etis dan moral yang kuat dalam membangun kesadaran sosial.

Sejarah pemikiran Islam menunjukkan bahwa aktivitas politik merupakan bagian dari pengamalan agama. Tradisi intelektual Islam menekankan pentingnya tata kelola masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bersama. Pemikir seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Ibnu Khaldun menggarisbawahi peran manusia sebagai khalifah yang berkewajiban membangun tatanan sosial yang adil. Oleh sebab itu, pendidikan Islam secara teoretis memiliki landasan kuat untuk membentuk kesadaran politik yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial. Namun, pada tataran praktik, sekolah Islam kerap menghadapi tantangan dalam melaksanakan pendidikan politik karena isu ini dianggap sensitif, dapat memunculkan perbedaan pandangan ideologis, atau dipersepsikan dekat dengan politik praktis. Dengan demikian, penting untuk mengkaji bagaimana sekolah Islam menjalankan peran edukatifnya tanpa menimbulkan bias ideologis atau persoalan baru.

Modernisasi demokrasi di Indonesia menempatkan generasi muda sebagai subjek penting dalam proses perubahan sosial dan politik. Mereka akan terlibat sebagai pemilih, aktor politik, dan pembuat kebijakan di masa depan. Karenanya, sekolah Islam dituntut untuk membekali peserta didik dengan wawasan politik yang matang, kritis, dan etis sejak dini. Pendidikan politik harus diarahkan agar siswa memiliki kemampuan dalam membaca situasi publik, menerima perbedaan pandangan, berdialog secara konstruktif, terlibat dalam kegiatan sosial, dan peduli terhadap permasalahan masyarakat. Proses ini harus dilakukan tanpa mengikis identitas keislaman siswa, dan justru memperkuat hubungan harmonis antara nilai Islam dan prinsip demokrasi.

Secara struktural, sekolah Islam mengintegrasikan kurikulum nasional dengan nilai-nilai pendidikan Islam, sehingga memiliki ruang untuk memasukkan perspektif Islam dalam pembelajaran politik. Mata pelajaran PPKn dapat dipadukan dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk pemahaman yang tidak hanya teoritis, tetapi juga berbasis moral. Selain itu, kegiatan pendidikan politik dapat dikembangkan melalui organisasi kesiswaan, debat publik,

pengabdian masyarakat, dan kegiatan keagamaan. Melalui aktivitas tersebut, siswa memperoleh pengalaman nyata yang mendorong kematangan pribadi dan sosial.

Meski memiliki potensi besar, implementasi pendidikan politik di sekolah Islam masih dihadapkan pada berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan kompetensi guru dalam mengajarkan materi politik, minimnya sumber belajar yang relevan, kurangnya ruang diskusi yang demokratis, dan kekhawatiran terhadap munculnya konflik ideologis. Pada sisi lain, terdapat asumsi bahwa pendidikan politik dapat memicu perilaku ekstrem jika dikelola dengan pendekatan yang keliru. Permasalahan ini mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi strategi pendidikan politik yang diterapkan di sekolah Islam secara sistematis.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian mengenai peran sekolah Islam dalam membentuk kesadaran politik dan kewarganegaraan siswa menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kontribusi sekolah Islam dalam membangun kompetensi politik siswa, mengidentifikasi strategi pendidikan yang digunakan, serta mengkaji faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses tersebut. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pendidikan Islam dan kewarganegaraan. Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan yang mampu membentuk generasi muslim yang berkepribadian, rasional, toleran, dan memiliki tanggung jawab sosial dalam kehidupan demokratis.

METODE PENELITIAN

Sekolah Islam bukan sekadar lembaga pendidikan formal yang mentransfer pengetahuan kognitif, melainkan sebuah ruang *Being in the world* di mana siswa berinteraksi dengan realitas sosial secara mendalam. Visi untuk menumbuhkan kesadaran politik di institusi ini harus dipahami sebagai sebuah *Ereignis* peristiwa pengungkapan makna di mana nilai keislaman dan kebangsaan tidak hanya diajarkan sebagai materi hafalan, tetapi sebagai bagian integral dari identitas diri siswa (Anam, 2025). Dengan menggeser fokus dari sekadar "fakta sosial" yang statis menuju pemahaman peristiwa yang bermakna, sekolah Islam mampu menghadirkan pendidikan politik yang menghormati dimensi transendental setiap individu dalam kerangka demokrasi yang matang (Siswa, Islam, & Syamsul, 2025).

Dalam upaya membentuk identitas kewarganegaraan, penanaman prinsip keadilan (*al-'adl*) dan amanah bukan sekadar pengembangan dimensi afektif, melainkan proses *aletheia* atau penyingkapan kebenaran etis di tengah masyarakat (Hidayat et al., 2023). Nilai-nilai ini menjadi fondasi bagi siswa untuk menolak "dehumanisasi" yang sering kali muncul akibat sistem pendidikan yang memandang manusia hanya sebagai objek data atau *standing reserve*. Melalui pendekatan moral etika ini, sekolah Islam menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara nilai-nilai Islam dan dinamika kehidupan modern, memastikan bahwa kesadaran politik siswa selalu berpijak pada integritas dan

tanggung jawab sosial .

Model partisipatif melalui organisasi intra-sekolah (OSIS) dan musyawarah kelas mencerminkan konsep *Mitsein* (berada-bersama), di mana siswa mempraktikkan demokrasi bukan sebagai teori, melainkan sebagai cara hidup yang otentik (Shonhadji, 2022). Pengalaman partisipasi ini memungkinkan terjadinya momen pengungkapan makna kolektif, di mana siswa belajar menyuarakan pendapat dan menghargai perbedaan melalui dialog yang konstruktif. Di sini, sekolah menjadi ekosistem pembelajaran politik yang inklusif, mengubah aktivitas organisasi menjadi peristiwa bermakna yang mengasah kepemimpinan dan rasa memiliki terhadap bangsa serta negara (Irfanda, Zahara, Sari, Agama, & Sumbar, 2025).

Tantangan seperti dualisme pendidikan dan arus globalisasi dapat diidentifikasi sebagai bentuk *Gestell* (perangkaan) yang mencoba mereduksi nilai-nilai spiritual menjadi sekadar instrumen teknokratis yang kering (Azis¹, Rizqi, Indah, & K, 2025). Ketidaksiapan guru dalam menyeimbangkan antara ajaran agama dan praktik politik kontemporer sering kali menyebabkan hilangnya kedalaman eksistensial dalam proses pembelajaran (Hadi & Hidayat, n.d.). Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan reorientasi metodologis yang tidak hanya mengejar standardisasi data, melainkan berani membuka ruang bagi keterlibatan aktif dan refleksi kritis guna melawan alienasi di tengah perubahan sosial yang dinamis (Helmi, 2021).

Model ideal pendidikan politik di sekolah Islam pada akhirnya harus mengarah pada praktik yang mengintegrasikan nilai-nilai profetik ke dalam seluruh struktur kurikulum secara holistik . Pendekatan ini memungkinkan pendidik untuk memahami bagaimana dunia dikonstruksi bagi siswa yang meyakini bahwa kehadiran Tuhan adalah realitas yang relevan dalam setiap tindakan kewarganegaraan. Dengan menjadikan keteladanan guru sebagai poros, sekolah Islam berpotensi melahirkan generasi muslim yang tidak hanya cerdas secara politik, tetapi juga mampu menjalankan misi transendensi dalam kehidupan demokratis dan kebangsaan (Khamim, Siregar, & Yaldi, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sekolah Islam dan Konteks Sosial Politik

Sekolah Islam di Indonesia dibangun atas dasar pemikiran bahwa proses pendidikan harus mengembangkan manusia secara menyeluruh, yang mencakup dimensi kognitif, afektif, psikomotorik, serta spiritual. Institusi pendidikan Islam tidak sekadar dipahami sebagai tempat mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan nilai moral dan sikap sosial masyarakat (*Gambaran Umum Sekolah Islam Dan Konteks Sosial-Politik*, 2020). Dalam sistem demokrasi, sekolah Islam memiliki tanggung jawab baru dalam menyiapkan generasi yang mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial-politik bangsa.

Pasca reformasi, sistem politik Indonesia mengalami perubahan besar, ditandai dengan terbukanya ruang kebebasan berpendapat, hadirnya keragaman ideologi, serta kompetisi politik yang semakin intens. Akan tetapi,

perkembangan tersebut tidak selalu diikuti dengan peningkatan literasi politik pada kalangan pelajar. Munculnya fenomena seperti polarisasi politik, penggunaan agama untuk kepentingan elektoral, penyebaran hoaks, serta meningkatnya intoleransi menunjukkan lemahnya fondasi kewarganegaraan kaum muda. Dalam situasi ini, sekolah pembiasaan nilai dalam budaya sekolah. Akan tetapi, keberhasilan pendidikan politik di sekolah sangat bergantung pada faktor internal, seperti sumber daya guru dan lingkungan belajar, serta faktor eksternal, seperti keluarga dan media Islam memiliki fungsi strategis untuk membangun kesadaran politik yang inklusif, moderat, dan berakar pada nilai-nilai Islam yang humanis.

Sejumlah sekolah Islam telah melakukan berbagai upaya melalui kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan. Oleh karena itu, pembahasan ini menguraikan bagaimana pendidikan politik diwujudkan secara nyata dan kontribusinya terhadap pembentukan identitas kewarganegaraan siswa.

Model Pendidikan Politik di Sekolah Islam

Pendidikan politik di sekolah Islam memegang peran krusial dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan siswa yang menggabungkan nilai Islam dan kebangsaan. Pendekatan ini bukan bersifat indoktrinasi, melainkan edukatif yang menitikberatkan pemahaman, sikap, serta praktik demokrasi yang harmonis dengan ajaran Islam, guna mencetak siswa sadar politik, bertanggung jawab sosial, dan beretika dalam bernegara (Susanti & Kurniawati, 2024). Model integratif dalam kurikulum menjadi salah satu pendekatan utama, di mana pendidikan politik disisipkan ke berbagai mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Agama Islam, Sejarah, dan Ilmu Sosial. Integrasi ini memfasilitasi siswa memahami kekuasaan, kepemimpinan, hak-kewajiban warga negara, keadilan, serta musyawarah dari perspektif Islam dan kenegaraan, sehingga terlihat keterkaitan agama dengan dinamika sosial-politik (Irfanda et al., 2025). Model berbasis nilai dan karakter menekankan pembiasaan akhlak seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, toleransi, serta empati sosial sebagai dasar etika politik. Pendekatan holistik ini mencakup dimensi kognitif, afektif, dan perilaku, memungkinkan siswa menginternalisasi nilai-nilai politik bermoral secara mendalam.

Model partisipatif diwujudkan melalui kegiatan seperti OSIS, musyawarah kelas, pemilihan ketua, dan ekstrakurikuler, yang melatih siswa langsung dalam proses demokrasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan kolektif, serta resolusi konflik damai (Franata et al., 2024). Aktivitas ini mengasah keterampilan politik praktis dan rasa tanggung jawab komunal. Model keteladanan (uswah) menjadikan guru serta pimpinan sekolah sebagai role model dalam sikap adil, transparan, dan demokratis, yang diamati serta ditiru siswa sehari-hari. Pendekatan ini membuktikan bahwa pendidikan politik efektif bila tidak hanya diajarkan, tapi juga diterapkan secara konkret. Secara keseluruhan, model-model pendidikan politik di sekolah Islam bersifat holistik-kontekstual, meliputi integrasi kurikulum, penanaman nilai, partisipasi siswa, dan teladan pendidik, yang membentuk generasi sadar politik, bermoral tinggi, serta aktif dalam demokrasi.

Pendidikan politik sekolah Islam esensial untuk kesadaran kewarganegaraan siswa berbasis nilai Islam-kebangsaan, dengan pendekatan edukatif yang membangun pemahaman, sikap, dan praktik demokrasi Islami guna menghasilkan warga negara bertanggung jawab dan beretika. Pendekatan integratif menyatukan pendidikan politik dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Agama Islam, Sejarah, serta Ilmu Sosial, membekali siswa konsep kekuasaan, kepemimpinan, hak-kewajiban, keadilan, dan musyawarah secara terintegrasi. Model nilai-karakter membiasakan akhlak politik seperti amanah, toleransi, dan kepedulian melalui aspek kognitif-afektif-perilaku (Saadah, Nur, Ramadhani, Azzahra, & Fajrussalam, 2022). Partisipatif melalui OSIS, musyawarah, pemilu internal, dan ekstrakurikuler melatih demokrasi riil, sementara keteladanan guru mencontohkan sikap demokratis nyata. Model holistik ini mencetak siswa politik sadar, berakhlak, dan demokratis.

Eksistensi Nilai Islam dalam Pendidikan Politik

Nilai-nilai Islam menonjol dalam pendidikan politik, khususnya untuk membentuk sikap, orientasi, dan perilaku politik yang didasari moral serta etika. Pendidikan politik dari sudut pandang Islam tidak hanya menyediakan pengetahuan tentang sistem politik dan kekuasaan, melainkan juga menanamkan prinsip keadilan, amanah, tanggung jawab, serta kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pendidikan politik berbasis Islam menjadi alat pembentuk karakter warga negara yang utuh dan beradab. Prinsip keadilan (al-'adl) merupakan nilai pokok Islam yang esensial dalam pendidikan politik, menjadi dasar pengambilan keputusan dan tata kelola pemerintahan (Pambudi, Pendidikan, & Islam, 2025). Melalui pendidikan ini, siswa dibekali kesadaran menolak ketidakadilan, penindasan, serta penyalahgunaan wewenang, sehingga muncul sikap kritis terhadap kebijakan publik dan komitmen memperjuangkan kepentingan umum. Nilai amanah dan tanggung jawab turut menjadi pusat pendidikan politik Islam, di mana kekuasaan dianggap amanah yang wajib diemban dengan integritas, bukan untuk kepentingan pribadi. Pendekatan ini menekankan kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, yang relevan untuk membentuk generasi muda beretika politik dan peka terhadap implikasi keputusan publik.

Prinsip musyawarah (syura) berperan krusial dalam pendidikan politik Islam dengan mendorong partisipasi, dialog, dan penghargaan terhadap perbedaan (Hakiki, Hermanto, Akbar, Adabi, & Dalimunthe, 2025). Di lingkungan pendidikan, nilai ini melatih siswa berdiskusi secara bijaksana, menyuarakan pendapat dengan sopan, serta menerima hasil musyawarah, sehingga memperkuat budaya demokratis yang selaras dengan ajaran Islam. Penanaman akhlak politik seperti toleransi, moderasi, dan kepedulian sosial juga mencerminkan eksistensi nilai Islam dalam pendidikan politik, menjadikannya sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat daripada sekadar perebutan kekuasaan. Pendekatan ini mampu mencegah ekstremisme, fanatisme sempit, serta konflik yang mengancam persatuan. Secara keseluruhan, nilai-nilai Islam berperan vital sebagai fondasi etis-moral dalam pendidikan politik,

memperkaya pemahaman siswa tentang kehidupan berbangsa sekaligus membentuk warga negara yang politik sadar, berakhlak luhur, dan bertanggung jawab dalam demokrasi.

Nilai Islam memiliki keberadaan yang kokoh dalam pendidikan politik untuk membentuk sikap serta perilaku politik yang berpijak pada etika dan moral. Pendidikan politik Islam melampaui pemberian pengetahuan sistem kekuasaan, dengan menekankan keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kesejahteraan umat, sehingga menjadi wahana pembentukan warga negara berintegritas (Hidayat et al., 2023). Keadilan (al-'adl) sebagai nilai inti mendasari keputusan politik dan pemerintahan, ditanamkan melalui pendidikan untuk membangun penolakan terhadap kezaliman dan komitmen pada keadilan publik. Amanah dan tanggung jawab memandang kekuasaan sebagai titipan ilahi yang menuntut kejujuran serta akuntabilitas, relevan bagi pembentukan etika politik generasi muda. Musyawarah (syura) mendorong partisipasi dialogis dan toleransi perbedaan, melatih siswa dalam diskusi santun dan penerimaan keputusan kolektif untuk budaya demokrasi Islam. Akhlak politik seperti moderasi dan empati sosial menjadikan politik sebagai alat harmoni masyarakat, mencegah fanatisme dan konflik. Integrasi nilai Islam dalam pendidikan politik memperkaya wawasan bernegara sambil membentuk individu sadar politik, bermoral tinggi, dan aktif dalam kehidupan demokratis.

Pembentukan Identitas Kewarganegaraan Siswa

Pendidikan membentuk identitas kewarganegaraan siswa sebagai konstruksi sosial-edukatif melalui proses pembelajaran, pengalaman sosial, dan penanaman nilai kebangsaan. Identitas ini meliputi pemahaman status warga negara, kesadaran hak-kewajiban, rasa memiliki terhadap bangsa-negara, serta komitmen partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Sekolah berperan sentral dalam membangun identitas ini secara sistematis dan berkelanjutan (Irfanda et al., 2025). Pendidikan nilai serta pengetahuan kewarganegaraan menjadi fondasi utama, terutama melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang memperkenalkan nilai dasar negara, konstitusi, sistem pemerintahan, dan prinsip demokrasi. Pemahaman kognitif ini membekali siswa dasar untuk menjadi warga sadar hukum dan bertanggung jawab.

Internalisasi sikap serta nilai sosial juga krusial, di mana sekolah menanamkan toleransi, persatuan, keadilan, dan penghargaan keberagaman lewat budaya sekolah serta interaksi harian. Proses ini membentuk sikap inklusif yang esensial bagi identitas kewarganegaraan di masyarakat majemuk. Pengalaman partisipatif melalui organisasi siswa, musyawarah kelas, pemilihan pengurus, serta kegiatan sosial-kemasyarakatan memungkinkan siswa mempraktikkan demokrasi dan tanggung jawab sosial (Irfanda et al., 2025). Pengalaman riil ini menegaskan bahwa kewarganegaraan melampaui status hukum menuju keterlibatan aktif. Keteladanan guru dan lingkungan sekolah turut memperkuat proses ini, dengan sikap adil, terbuka, serta menghargai opini siswa sebagai contoh nyata nilai kewarganegaraan. Atmosfer demokratis sekolah menumbuhkan rasa memiliki dan komitmen terhadap nilai

kebangsaan. Pembentukan identitas kewarganegaraan siswa bersifat multidimensional, mengintegrasikan pendidikan formal, pengalaman sosial, dan pembiasaan nilai melalui pendekatan sekolah yang partisipatif, menghasilkan warga negara berkarakter kuat dan demokratis (Susanti & Kurniawati, 2024). Identitas kewarganegaraan siswa terkonstruksi melalui pendidikan, interaksi sosial, dan internalisasi nilai nasional, mencakup kesadaran hak-kewajiban, loyalitas bangsa, serta partisipasi aktif. Sekolah secara strategis membentuknya lewat program terstruktur. PPKn menyediakan landasan kognitif tentang nilai negara, hukum, dan demokrasi untuk warga bertanggung jawab. Penanaman sikap toleran serta inklusif via budaya sekolah mendukung adaptasi di masyarakat plural. Partisipasi di OSIS, musyawarah, dan kegiatan ekstrakurikuler melatih praktik demokrasi nyata. Teladan guru dalam keadilan dan keterbukaan memperkokoh rasa memiliki nilai kebangsaan. Proses holistik ini mencetak siswa sebagai warga negara komitmen demokratis dan berkarakter.

Tantangan dan Hambatan Pendidikan Politik di Sekolah Islam

a. Hambatan Kurikulum dan Integrasi Nilai Politik Islam

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya integrasi pendidikan politik secara eksplisit dalam kurikulum sekolah Islam. Pendidikan politik sering tidak diposisikan sebagai fokus pembelajaran tersendiri sehingga pemahaman siswa bersifat parsial dan kurang mendalam. Ketiadaan kurikulum yang menggabungkan konsep politik dan nilai-nilai Islam secara sistematis menyebabkan pendidikan politik hanya tersirat dalam materi kewarganegaraan atau pendidikan agama saja (Hadi & Hidayat, n.d.). Hal ini menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembentukan sikap politik yang berbasis nilai Islam yang kuat.

b. Ketidaksiapan Guru dan Tenaga Pendidik

Kualitas dan kesiapan guru menjadi hambatan signifikan dalam pendidikan politik di sekolah Islam. Banyak guru belum memiliki kompetensi yang memadai dalam mengajar topik politik secara kritis dan kontekstual, terutama ketika harus menyeimbangkan antara ajaran keagamaan dan praktik politik kontemporer (Hadi & Hidayat, n.d.). Ketidaksiapan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pemahaman mendalam tentang hubungan antara Islam dan politik dalam konteks pendidikan formal.

c. Dualisme Sistem Pendidikan dan Sekularisme

Dualisme antara sistem pendidikan umum dan pendidikan agama kadang menciptakan hambatan bagi sekolah Islam untuk mengembangkan pendidikan politik secara holistik. Sistem pendidikan nasional yang sering menempatkan politik sebagai domain sekuler menyebabkan nilai-nilai Islam kurang mendapat ruang yang memadai dalam konteks pendidikan politik (Haris, 2024). Sekularisme pendidikan yang kuat dapat mengurangi kesempatan siswa untuk mengkaji politik dari perspektif keislaman secara seimbang, yang pada akhirnya mempengaruhi pembentukan identitas politik yang berbasis Islam dan kebangsaan.

d. Tekanan Sosial-Kultural dan Globalisasi

Selain faktor internal sekolah, pendidikan politik di sekolah Islam juga

menghadapi tantangan dari konteks sosial yang lebih luas, seperti globalisasi dan arus nilai dunia modern. Globalisasi sering membawa nilai-nilai yang tidak selalu sejalan dengan nilai Islam, sehingga siswa menghadapi kontradiksi antara norma keagamaan yang diajarkan di sekolah dengan realitas sosial dan media massa (Azis¹ et al., 2025). Kondisi ini dapat menghambat internalisasi nilai politik Islam yang relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

e. Kurangnya Dukungan Kebijakan dan Sumber Daya

Kebijakan pemerintah dan dukungan sumber daya juga menjadi hambatan pendidikan politik di sekolah Islam. Meski pemerintah mengakui pentingnya pendidikan agama, dukungan pada pengembangan pendidikan politik berbasis Islam masih terbatas. Ini termasuk alokasi waktu pembelajaran, fasilitas, dan materi pendukung yang relevan dengan konteks politik kontemporer. Ketimpangan infrastruktur dan sumber daya antara sekolah Islam dan sekolah umum turut memperlemah posisi pendidikan politik dalam lingkungan sekolah Islam.

f. Tantangan Nilai Identitas dan Pluralisme

Konflik antara nilai identitas Islam yang ingin ditanamkan dengan realitas pluralisme masyarakat juga menjadi tantangan signifikan. Sekolah Islam perlu menghadirkan pendidikan politik yang tidak hanya menekankan identitas keagamaan sempit, tetapi juga mencakup penghargaan terhadap keberagaman, toleransi, dan partisipasi dalam kerangka demokrasi nasional. Ketegangan antara eksklusivitas identitas dengan kebutuhan pluralisme politik menjadi hambatan dalam menanamkan sikap kewarganegaraan yang inklusif (Lastini, Haryanti, Minsih, & Widayarsi, 2024).

Model Ideal Pendidikan Politik di Sekolah Islam

Model pendidikan politik ideal di sekolah Islam bertujuan membentuk siswa yang sadar akan politik, memiliki identitas kewarganegaraan kuat, serta karakter moral yang kokoh berdasarkan nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Pendidikan ini bukan sekadar pengajaran teknik politik praktis, melainkan proses pembelajaran yang membangun pemahaman, sikap, serta kemampuan berpolitik secara etis, demokratis, dan bertanggung jawab. Pendekatan idealnya bersifat menyatu, melibatkan partisipasi, dan fokus pada pengembangan karakter (Angreni & Sari, 2020). Pendidikan politik ideal di sekolah Islam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan kewarganegaraan ke dalam kurikulum secara menyeluruh. Materi ini tidak berdiri sendiri, melainkan disisipkan melalui pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama Islam, Sejarah, serta Ilmu Pengetahuan Sosial. Pendekatan ini memungkinkan siswa menggali konsep politik, demokrasi, kepemimpinan, hak, dan kewajiban kewarganegaraan dari sudut pandang Islam yang mengedepankan keadilan, amanah, serta musyawarah. Di samping pengintegrasian kurikulum, model ideal ini juga memprioritaskan pendidikan politik yang berakar pada nilai dan pembentukan karakter (Masamah, 2016). Sekolah Islam menanamkan nilai-nilai politik lewat pembiasaan akhlak mulia, seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian terhadap masyarakat. Nilai-nilai ini membentuk dasar etika politik siswa dalam

menghadapi perbedaan opini dan dinamika sosial (Ihwanuddin & Pd, 2017). Pendidikan ini mencakup aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik, sehingga nilai-nilai tersebut meresap ke dalam perilaku sehari-hari siswa.

Model ideal pendidikan politik di sekolah Islam menjadikan partisipasi siswa sebagai komponen kunci. Siswa dilatih melalui organisasi intra-sekolah, musyawarah kelas, pemilihan ketua OSIS, dan program sosial kemasyarakatan, sehingga mereka dapat menerapkan prinsip demokrasi, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial secara langsung. Pengalaman ini membuat siswa memahami dinamika politik secara nyata dan menyadari peran penting diri dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh teladan dari guru serta lingkungan sekolah yang demokratis merupakan fondasi utama model ini. Pendidik dan pimpinan sekolah menjadi panutan dengan sikap adil, terbuka, dan menghormati keragaman. Suasana sekolah yang mendorong dialog, musyawarah, dan keterbukaan menciptakan ekosistem pembelajaran politik yang kondusif dan inklusif, di mana siswa belajar politik lewat pengalaman langsung. Secara keseluruhan, model pendidikan politik ideal di sekolah Islam bersifat holistik dan berkesinambungan, meliputi pengintegrasian kurikulum, penanaman nilai, keterlibatan aktif siswa, serta keteladanan pendidik. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan generasi muda yang cerdas politik, berakhlak luhur, moderat, serta bertanggung jawab sebagai warga negara dalam sistem demokrasi dan kebangsaan.

KESIMPULAN

Sekolah Islam memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran politik dan identitas kewarganegaraan siswa melalui pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Pendidikan politik di sekolah Islam yang bersifat edukatif, integratif, dan partisipatif mampu menanamkan pemahaman politik yang etis, moderat, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, toleransi, dan tanggung jawab menjadi fondasi moral dalam membentuk sikap politik siswa. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, pendidikan politik di sekolah Islam berpotensi besar melahirkan generasi muda yang sadar politik, berakhlak, dan aktif dalam kehidupan demokratis apabila didukung oleh kurikulum yang tepat, pendidik yang kompeten, serta lingkungan sekolah yang demokratis dan inklusif.

REFERENSI

- Anam, R. K. (2025). Sociology of Ereignis: A New Ontological Foundation for Prophetic Social Science. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 20(1), 31-62. <https://doi.org/10.14421/k30v0343>
- Angreni, S., & Sari, R. T. (2020). Identification and Implementation of Inclusion Education for Children with Special Needs. *AULADUNA Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 7(2), 145-153.
- Anjani, D. N., & Fadhil, A. (2025). *Revitalisasi Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Kesadaran Sipil Perspektif Sosiologi Pendidikan*. 3(4), 70-81.

- Azis¹, A., Rizqi, A. F., Indah, L. L., & K, N. K. (2025). *Tantangan dan Problematika Pendidikan Masa Kini dalam Perspektif Islam di Era Globalisasi*.
- Franata, Y. A., Abidin, A. Z., Us, K. A., Jln, A., Rahman, A., No, H., ... Jambi, K. (2024). *Politik da* Franata, Y. A., Abidin, A. Z., Us, K. A., Jln, A., Rahman, A., No, H., ... Jambi, K. (2024). *Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia*. (5).n *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia*. (5).
- Gambaran Umum Sekolah Islam dan Konteks Sosial-Politik. (2020). 16(1), 40–51.
- Hadi, A., & Hidayat, S. (n.d.). *The Politics of Islamic Education and the Independent Curriculum as an Effort to Integrate Islamic Values in the National Education*.
- Hakiki, I., Hermanto, E., Akbar, A., Adabi, M. Z., & Dalimunthe, F. H. (2025). *Politik dalam Al Qur ' an*. 1(4), 770–775.
- Haris, M. A. (2024). *Etika Politik dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam*. 6(2), 164–172.
- Helmi, M. (2021). *Pandecta Pembelaan (Pledoi) Advokat berdasar Paradigma Critical Theory Guba And Lincoln*. 16(1), 45–54.
- Hidayat, T., Agama, T., Sangatta, I., & Timur, K. (2023). *Pendidikan Politik Dalam Perspektif Qur ` An : Implementasi Pembentukan Budaya Politik Masyarakat Beradab menyampaikan : 2(1), 147–162*.
- Ihwanuddin, H., & Pd, M. (2017). *PERAN POLITIK PENDIDIKAN ISLAM ISLAM MENUJU PENDIDIKAN ABAD XXI*. 03(1), 185–208.
- Irfanda, H., Zahara, A., Sari, L. P., Agama, I., & Sumbar, I. (2025). *Pendidikan islam dan dinamika politik integrasi dan pengaruhnya di indonesia*. 3, 80–86.
- Khamim, S., Siregar, N., & Yaldi, Y. (2024). *Pengaruh Dan Tantangan Pendidikan Agama Islam Dalam Dinamika Politik Di Indonesia*. 4, 2027–2042.
- Lastini, F., Haryanti, S., Minsih, & Widyasari, C. (2024). *Implementasi Strategi Pembelajaran Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar*. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09(03), 208–220.
- Masamah, U. (2016). *Pendidikan Islam , Pendidikan Politik , Dan Dialog Antar Umat Beragama Di Indonesia*. 4, 1–19.
- Pambudi, R., Pendidikan, J., & Islam, A. (2025). *Peran Pendidikan Islam dalam Konteks Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi*. (April).
- Saadah, I. I., Nur, N. L., Ramadhani, S., Azzahra, S., & Fajrussalam, H. (2022). *AR-RASYID : JURNAL PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Politik Islam Kepada Kaula Muda Sebagai Upaya Untuk Membentuk Kesadaran Terhadap Agama Islam*. 2(2), 90–102.
- Shonhadji, N. (2022). *Fraud Analysis on Illegal Online Lending Using Habermas' Theory of the Public Sphere*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 17(1), 33. <https://doi.org/10.24843/jiab.2022.v17.i01.p03>
- Siswa, P., Islam, S. M. P., & Syamsul, A. (2025). *PENDAS : Primary Education Journal*. 6, 46–51.
- Susanti, S. S., & Kurniawati, D. (2024). *Pendidikan islam dan dinamika politik integrasi dan pengaruhnya di indonesia*. 16(1), 126–145. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v16i1.2947>